

**STRATEGI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG DALAM MEMBANGUN KEBIJAKAN
BERBASIS RISET**

SKRIPSI

Oleh

RATNA ATIKA SUPRIYADI

NPM 1916041051



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2025

**STRATEGI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG DALAM MEMBANGUN KEBIJAKAN
BERBASIS RISET**

Oleh

RATNA ATIKA SUPRIYADI

NPM 1916041051

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

Strategi Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Dalam Membangun Kebijakan Berbasis Riset

Oleh :

Ratna Atika Supriyadi

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung memainkan peran strategis dalam mewujudkan kebijakan publik berbasis riset yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Namun, pelaksanaan penelitian sebagai dasar pembuatan kebijakan masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan yang tidak memadai, dan lemahnya koordinasi antar perangkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Balitbangda Provinsi Lampung dalam mengembangkan kebijakan berbasis riset dengan menggunakan kerangka teori Jack Korten, yang terdiri dari strategi organisasi, program, dukungan sumber daya, dan kelembagaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Daerah (RIPPD) untuk periode 2019–2024. Temuan menunjukkan bahwa Balitbangda telah merumuskan arah strategis yang jelas dan berupaya memperkuat penelitian lintas sektor tematik, meningkatkan kompetensi staf, serta memperluas jaringan kerja sama dengan universitas. Namun, implementasinya masih terbatas oleh jumlah peneliti fungsional yang sedikit, rendahnya proporsi pendanaan penelitian (sekitar 28% dari total anggaran), dan lemahnya mekanisme hasil penelitian ke dalam kebijakan daerah. Diskusi mengungkapkan bahwa sinergi di antara keempat strategi tersebut belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga dampak kebijakan masih terbatas. Sebagai kesimpulan, penguatan kelembagaan, optimalisasi sumber daya, dan pembentukan jaringan advokasi kebijakan berbasis bukti sangat penting agar Balitbangda dapat berfungsi secara efektif sebagai penggerak pembuatan kebijakan berbasis penelitian di Provinsi Lampung.

Kata Kunci: Kebijakan Berbasis Riset, Balitbangda, Jack Korten

***Strategi Of the Lampung Provincial Research and Development Agency in
Development Agency in Developing Research Based Policies***

By:

Ratna Atika Supriyadi

The Regional Research and Development Agency (Balitbangda) of Lampung Province plays a strategic role in realizing evidence-based public policies that are effective, accountable, and sustainable. However, the implementation of research as the foundation for policymaking still faces several obstacles, including limited human resources, insufficient funding, and weak coordination among regional government agencies. This study aims to analyze the strategies of Balitbangda Lampung Province in developing evidence-based policies using Jack Kotten's theoretical framework, which consists of organizational, programmatic, resource-supporting, and institutional strategies. This research employed a qualitative descriptive method with data collected through in-depth interviews, observation, and document analysis of the Strategic Plan (Renstra), Institutional Performance Report (LKIP), and Regional Research and Development Master Plan (RIPPD) for 2019–2024. The findings indicate that Balitbangda has formulated a clear strategic direction and made efforts to strengthen thematic cross-sector research, improve staff competencies, and expand collaboration networks with universities. However, the implementation remains constrained by the limited number of functional researchers, the low proportion of research funding (approximately 28% of the total budget), and weak mechanisms for research results into regional policies. The discussion reveals that the synergy among the four strategies has not yet been fully integrated, resulting in limited policy impact. In conclusion, institutional strengthening, optimization of resources, and the establishment of an evidence-based policy advocacy network are essential to enable Balitbangda to function effectively as a driving force for research-based policymaking in Lampung Province.

Key Word: Evidence-Based Policy, Balitbangda, Jack Kotten

Judul Skripsi : Strategi Badan Penelitian Dan Pengembangan
Daerah Provinsi Lampung Dalam Membangun
Kebijakan Berbasis Riset
Nama Mahasiswa : Ratna Atika Supriyadi
Nomor Pokok Mahasiswa : 1916041051
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.
NIP. 198506202008122001

Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si.
NIP. 198807122019031012

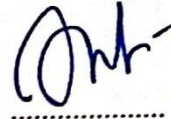
2. Ketua Jurusan Administrasi Negara

Dr. Susana Indriyati Caturiani, S. IP., M. Si.
NIP. 197009142006042001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.**



Sekretaris : **Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si.**



Penguji : **Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 04 November 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 15 Oktober 2025
Yang membuat pernyataan,



Ratna Atika Supriyadi
NPM. 1916041051

RIWAYAT HIDUP



Peneliti lahir di Seputih Banyak, pada tanggal 10 Februari 2001. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Supriyadi dan Ibu Suwarni. Peneliti menyelesaikan pendidikannya di TK Pertiwi pada tahun 2007, SD Negeri 1 Seputih Banyak pada tahun 2013, SMP

Negeri 1 Seputih Banyak pada tahun 2016, dan SMA Negeri 1 Seputih Banyak tahun 2019. Pada tahun 2019 peneliti terdaftar sebagai mahasiswi Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri). Selama menjadi mahasiswi, peneliti melakukan beberapa kegiatan antara lain:

1. Menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara Universitas Lampung, Departemen Minat dan Bakat periode 2019/2020 dan anggota Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara Universitas Lampung Departemen Kajian Pengembangan dan Keilmuan periode 2020/2021.
2. Menjadi anggota Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat Universitas (BEM – U KBM Unila), Kementerian Kepemudaan periode 2019/2020 dan 2020/2021
3. Menjadi anggota komunitas Lampung Cerdas pada tahun 2019 – 2021.
4. Mendirikan Komunitas Sahabat Indonesia Berbagi regional Lampung dan menjabat sebagai Sekertaris Umum sejak tahun 2021 – sekarang.
5. Mengikuti program studi MBKM Kampus Merdeka dari Kementerian Pendidikan dan Budaya dengan mengambil kegiatan Kampus Mengajar di SD Negeri 5 Sumberrejo, Kemiling, Bandar Lampung pada Agustus sampai Desember 2021.
6. Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN Mandiri Putra Daerah) pada bulan Januari sampai dengan Februari 2022 di Desa Wirata Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Indonesia.

7. Mengikuti program studi MBKM Kampus Merdeka dari Kementerian Pendidikan dan Budaya dengan mengambil kegiatan Magang Merdeka di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung pada Maret sampai dengan Agustus 2022.

MOTTO

“Just Do It”

(Nike)

“Even the Late Bloom still Blooms”

(Ratna Atika Supriyadi)

PERSEMBAHAN



Peneliti panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam terucapkan kepada Nabi Muhammad SAW tauladan *berakhlakul karimah*.

KUPERSEMBAHKAN KARYA (SKRIPSI) INI KEPADA:

“Kedua Orang Tuaku Tersayang, yang mencintaiku, merawatku, menjagaku, membimbingku, serta mendukungku hingga aku dapat menjadi pribadi yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Meskipun aku tidak bisa membalas begitu besarnya cinta kasih yang kalian berikan kepadaku, semoga dengan aku menyelesaikan pendidikan Sarjana ini aku dapat menjadi anak yang dapat selalu kalian banggakan dan jerih payah kalian selama ini dapat sedikit terbayarkan.”

“kepada adikku tersayang Duwi Atika Sari Supriyadi, S.Ak yang selama ini selalu mendukung dan menyemangatiku meskipun aku belum bisa sepenuhnya menjadi panutan yang dapat dibanggakan”

“Kepada diriku yang tidak pernah menyerah meskipun tidak semua hari dapat dilalui dengan mudah. Meskipun terlambat, terimakasih karena sudah mau berjuang sampai akhir”

SANWACANA

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian yang berjudul ***“Strategi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dalam Membangun Kebijakan Berbasis Riset”***. Selama masa penelitian, peneliti mendapatkan limpahan bantuan, dukungan dan bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu, peneliti ucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua orang tuaku tersayang, Bapak Supriyadi dan Ibu Suwarni dan juga adikku tersayang Duwi Atika Sari Supriyadi, S.Ak yang telah memberikan limpahan dukungan dan kasih sayangnya selama melaksanakan penelitian panjang ini.
2. Kekasihku, Lucky Ades Tiyan, SE yang telah memberikan limpahan dukungan dan kasih sayangnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian panjang ini.
3. Ibu Prof. Anna Agustina Z, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Susana Indriyati, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S. AP., M. AP selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membantu proses perkuliahan.
6. Prof. Intan Fitri Meutia, S. A. N., M.A., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan dukungan, bantuan serta meluangkan waktu untuk melaksanakan bimbingan skripsi hingga selesai.
7. Bapak Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta meluangkan waktu untuk melaksanakan bimbingan skripsi hingga selesai.
8. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Penguji yang senantiasa memberikan masukan terhadap skripsi ini.
9. Pihak FISIP Unila yang telah membantu peneliti dalam proses perkuliahan.

10. Pihak Badan Penelitian dan Pengemban Daerah Provinsi Lampung yang telah memberikan ide serta bantuan hingga peneliti dapat mengusung judul hingga menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti berusaha agar laporan ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan keilmuan di bidang Ilmu Administrasi Negara dan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, 3 November 2025

Peneliti,



Ratna Atika Supriyadi

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iv
 PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
 TINJAUAN PUSTAKA	 8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Organisasi Publik	9
2.3 Strategi.....	11
2.4 Kebijakan Berbasis Riset.....	16
2.5 Kerangka Pemikiran	19
 METODE PENELITIAN	 21
3.1 Pendekatan Penelitian.....	21
3.2 Fokus Penelitian	21
3.3 Lokasi Penelitian	22
3.4 Jenis dan Sumber Data	22
3.4.1 Data Primer	23
3.4.2 Data Sekunder.....	23

3.5	Teknik Pengumpulan Data	23
3.5.1	Wawancara.....	23
3.5.2	Dokumentasi	24
3.6	Teknik Analisis Data	24
3.6.1	Kondensasi Data	25
3.6.2	Penyajian Data	25
3.6.3	Penarikan Kesimpulan	25
3.7	Teknik Keabsahan Data.....	25
3.7.1	Teknik Triangulasi.....	26
3.7.2	Kecukupan Refrensial.....	26
3.7.3	Teknik Pemeriksaan Bergantungan	26
3.7.4	Kepastian Data.....	27
IV.	PEMBAHASAN	28
4.1	Hasil Penelitian.....	28
4.1.1	Strategi Organisasi	28
4.1.2	Strategi Program.....	31
4.1.3	Strategi Pendukung Sumberdaya.....	36
4.1.3.1	Sarana dan Prasarana.....	36
4.1.3.2	Sumberdaya Manusia	39
4.1.3.3	Sumber Daya Finansial	42
4.1.4	Strategi Kelembagaan.....	45
4.1.4.1	Struktur Organisasi.....	45
4.1.4.2	Kewenangan	47
4.1.4.3	Standar Operasional Prosedur	49
4.1.5	Faktor Penghambat.....	51

4.2 Pembahasan	52
4.2.1 Strategi Organisasi	52
4.2.2 Strategi Program.....	57
4.2.3 Strategi Pendukung Sumber Daya.....	62
4.2.4 Strategi Kelembagaan.....	72
4.2.5 Faktor Penghambat.....	82
PENUTUP.....	88
5.1 Kesimpulan.....	88
5.2 Saran.....	90

DAFTAR PUSTKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pemetaan Permasalahan Balitbangda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024	3
Tabel 1. 2 Strategi dan Arah Kebijakan Balitbangda Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024	4
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 3. 1 Daftar Informan.....	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Rapat Kelitbangan 2023	33
Gambar 4. 2 Rakor MPRD.....	34
Gambar 4. 3 Seminar dan Diskusi Arah Agenda Riset.....	3

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan dinamika perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada serta mengatur arah pembangunan sesuai dengan undang undang yang berlaku.

Secara struktural pemerintah daerah tetap berada pada koordinasi pemerintah pusat. Kebijakan pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada tiap pemerintah daerah adalah bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah terhadap pelayanan masyarakat dalam membangun dan mengatur daerah masing masing dari aspek pembangunan maupun mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat dalam mengaplikasikan tuntutan era globalisasi. Hingga pada akhirnya, kemajuan maupun kemunduran setiap daerah dalam merespon perkembangan secara global ditentukan oleh daerah itu sendiri. (Fuady, 2020).

Dalam merespon setiap perubahan yang ada, setiap daerah memerlukan seperangkat kebijakan yang tepat guna dan berdaya saing. Hal ini menuntut Pemerintah untuk memiliki program yang kreatif dan inovatif serta berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Guna mewujudkan hal ini, setiap daerah diharuskan memiliki badan yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan. Sama hal nya dengan daerah lain, Provinsi Lampung juga perlu menyiapkan lembaga dan sistem birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik. Mulai dari kondisi geografis daerah serta adat istiadat masyarakatnya yang unik dan beragam, peran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sangatlah strategis.

Penelitian dan pengembangan memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi, bisnis, juga untuk penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Dalam membantu formulasi sebuah kebijakan, sudah tentu pemerintah memerlukan Lembaga Teknis Daerah untuk melaksanakan peningkatan hasil kelitbangan. Lembaga ini disebut dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (litbang) yang merupakan suatu lembaga yang mempunyai kewenangan dalam melakukan tugasnya dibidang penelitian dan pengembangan keilmuan dan memiliki peran strategis jangka panjang bagi kemajuan daerah (Gartika, 2017).

Di Provinsi Lampung ini sendiri terdapat lembaga teknis litbang yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung yang sesuai dengan Pergub nomor 56 Tahun 2019 bertugas membantu gubernur dalam melaksanakan penyelenggaraan di bidang kelitbangan yaitu Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Perencanaan, Paengoperasian, serta Evaluasi Kebijakan Daerah. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung ini diharapkan memiliki fungsi yang optimal dalam melaksanakan kegiatan kelitbangan. Untuk melaksanakan peran kelitbangan tersebut, Balitbangda Provinsi Lampung harus mampu menghasilkan output yang strategis.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Badan Penelitian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi kelitbangan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapam, perencanaan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintah daerah. Badan Litbang tidak hanya memiliki fungsi strategis terkait dengan penyelenggararaan kelitbangan dalam menghasilkan berbagai rumusan dan rekomendasi kebijakan lingkup pemerintahan, namun juga diharapkan mampu memfasilitasi inovasi daerah,

serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah

Adapun kegiatan kelitbang yang dilaksanakan oleh Balitbangda Provinsi Lampung ini berupa riset, penyusunan Naskah Kebijakan (*policy paper*) serta mengadakan lomba inovasi. Namun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balitbangda Provinsi Lampung masih menemui kendala yaitu:

Tabel 1. 1 Pemetaan Permasalahan Balitbangda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

No	Masalah Pokok	Akar Permasalahan
1.	Belum optimalnya hasil penelitian menjadi kebijakan daerah secara menyeluruh	1. Lemahnya dukungan lembaga terkait dalam implementasi hasil penelitian kelitbang 2. Belum optimalnya kontribusi data bahan masukan penyusunan laporan hasil penelitian
2.	Keterbatasan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia	1. Belum tercukupinya kualitas dan kuantitas SDM bidang teknis dalam mendukung riset dan inovasi 2. Belum tercukupinya kebutuhan jabatan fungsional (peneliti dan perekayasa)
3.	Kelembagaan yang belum utuh, yaitu belum terbentuknya majelis pertimbangan, tim pengendali mutu dan tim kelitbang	1. Belum optimalnya peran Balitbangda sesuai dengan tupoksinya 2. Belum adanya mekanisme penyusunan agenda riset daerah

Sumber : Renstra Balitbangda Provinsi Lampung 2019 – 2024

Dalam mengatasi isu strategis yang ada, Balitbangda Provinsi Lampung menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2019 – 2024 yaitu Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah yang Berbasis Riset. Mengacu pada hal tersebut, maka sasaran yang hendak dicapai oleh Balitbangda Provinsi Lampung adalah meningkatnya kualitas riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tugas

pokok dan fungsi utama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung khususnya dalam memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Gubernur. Sehingga dalam penentu keputusan dan kebijakan daerah akan berdasarkan hasil riset pengetahuan dan data yang sudah teruji. Kualitas kebijakan berkaitan erat dengan penguatan dukungan penguatan berdasarkan hasil kajian dan riset.

Dalam mengatasi permasalahan dan isu strategis yang ada, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung menentukan strategi dan arah kebijakan yang berisikan program indikatif tertuang dalam visi dan misi yang akan diemban oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019 – 2024. Adapun strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 2 Strategi dan Arah Kebijakan Balitbangda Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah daerah yang berbasis riset dan inovasi	Meningkatkan kualitas riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kelembagaan Balitbangda sesuai dengan Permendagri 17/2016 dan UU 11/2019 2. Penentuan standar penyusunan agenda riset daerah 3. Penguatan hasil – hasil riset dan inovasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan majelis pertimbangan, Tim pengendali mutu dan Tim Kelitbangan 2. Penyusunan agenda riset sesuai dengan kebutuhan kebijakan strategis daerah 3. Menentukan langkah diseminasi hasil riset dan inovasi

Sumber : Renstra Balitbangda Provinsi Lampung 2019 – 2024

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung sebagai perangkat daerah serta aktor utama dalam bidang penelitian dan pengembangan daerah harus dapat menciptakan dan mengembangkan strategi yang bukan hanya dapat menyelesaikan permasalahan strategis yang ada, juga diharuskan dapat meningkatkan kualitas riset sebagai rekomendasi kebijakan daerah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Lampung selama periode 2019 – 2024.

Meningkatnya kualitas riset yang dimanfaatkan sebagai rekomendasi kebijakan, tidak akan terlepas dari strategi yang dimiliki dan dikembangkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dan bagaimana strategi tersebut berhasil dilaksanakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Maka dari itu, Peneliti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana keberhasilan strategi yang dilaksanakan oleh Balitbangda Provinsi Lampung dalam upayanya meningkatkan kualitas riset sebagai rekomendasi kebijakan juga apa saja kendala yang menghambat Balitbangda Provinsi Lampung dalam melaksanakan strateginya.

Penelitian ini menggunakan analisis tipe – tipe strategi milik Jack Kooten dalam (Salusu, 2006) yaitu:

1. Strategi Organisasi, berfokus kepada visi dan misi yang dimiliki oleh Balitbangda Provinsi Lampung
2. Strategi program, berfokus kepada apa saja program yang dimiliki oleh Balitbangda Provinsi Lampung dan bagaimana dampaknya terhadap tujuan Balitbangda provinsi Lampung dalam meningkatkan kualitas riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah
3. Strategi pendukung sumber daya, berfokus kepada bagaimana Balitbangda Provinsi Lampung memanfaatkan sumber daya esensial (Sarana dan Prasarana, SDM, dan anggaran) dalam mendukung tujuannya,

4. Strategi Kelembagaan, berfokus kepada bagaimana Balitbangda Provinsi Lampung memaksimalkan strategi kelembagaannya.

Peneliti menggunakan teori yang di kemukakan oleh Kotten karena dinilai dapat memberikan deskripsi mengenai keberhasilan strategi yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Lampung dalam membangun kebijakan berbasis riset melalui analisis tipe strateginya.

Adapun urgensi penelitian ini, Dalam konteks pembangunan daerah yang dinamis dan kompleks, kebutuhan akan kebijakan publik yang tepat sasaran dan berbasis data menjadi semakin mendesak. Penelitian ilmiah yang berkualitas tinggi memegang peranan penting sebagai dasar penyusunan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Di sinilah peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung menjadi sangat krusial, yakni sebagai lembaga yang menghasilkan riset yang mampu menjawab kebutuhan aktual pemerintah daerah.

Namun demikian, masih terdapat tantangan terkait sejauh mana hasil riset Balitbangda dapat dimanfaatkan sebagai rujukan utama dalam proses perumusan kebijakan publik. Rendahnya kualitas riset, keterbatasan kolaborasi dengan stakeholder, serta lemahnya integrasi antara hasil penelitian dan pengambilan keputusan menjadi isu penting yang perlu diatasi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi urgen untuk dilakukan guna mengkaji strategi organisasi Balitbangda dalam meningkatkan kualitas risetnya agar lebih relevan, aplikatif, dan dapat dijadikan rujukan dalam pembuatan kebijakan.

Dengan menggunakan pendekatan Jack Kotten, yang menitikberatkan pada nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan organisasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat tata kelola riset di Balitbangda dan mendukung terciptanya kebijakan publik yang lebih berbasis pada bukti ilmiah (*evidence-based policy*).

Penelitian ini diharapkan dapat menambah studi terkait dengan strategi perangkat daerah dalam mengurus Kebijakan Berbasis Riset, terutama bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Lampung. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu acuan atau tolok ukur dalam melihat tingkat keberhasilan dari suatu strategi yang telah dilakukan oleh perangkat daerah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Strategi Balitbangda Provinsi Lampung dalam Membangun Kebijakan Berbasis Riset?
2. Apa saja faktor penghambat Balitbangda dalam membangun Kebijakan Berbasis Riset?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana strategi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dalam Membangun Kebijakan Berbasis Riset.
2. Untuk mengetahui apa saja tantangan dan hambatan Balitbangda Provinsi Lampung selama mengimplementasikan strategi yang dimiliki dalam upaya Membangun Kebijakan Berbasis Riset.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa karya ilmiah khususnya untuk mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara. Sumbangan pemikiran yang dimaksud ialah sebagai bahan referensi yang memudahkan seorang peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan strategi membangun kebijakan berbasis riset beserta hambatannya bagi pemerintah, masyarakat dan mahasiswa

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Limitasi	Research Gap
1	anto, R. D. (2023). Strategi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah (Studi Kasus di Provinsi Lampung Tahun 2022)	hanya mencakup strategi program, sumber daya pendukung, dan kelembagaan; belum menyertakan strategi organisasi (visi, nilai, struktur)	Menambahkan strategi organisasi agar lengkap sesuai kerangka Jack Kotten
2	naeni, Guntur. (2014). Peningkatan Kapasitas Fungsi Penelitian dan Pengembangan Daerah (Studi Kasus pada Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan). <i>Jurnal Administrasi Negara</i> , 20 (1), 11 – 19.	elitian yang dilakukan oleh Guntur Kurnaeni hanya berfokus kepada empat aspek yaitu sistem kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia dan program.	n satu aspek sesuai dengan teori Kotten yang belum terdapat dalam penelitian milik Guntur Kurnaeni yaitu Sumber daya pendukung (sarana prasarana, finansial).
3	rtika, Dewi. (2017). Strategi Penguatan Kapasitas Tata Kelola Penelitian dan Pengembangan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. <i>Jurnal Kebijakan Pembangunan</i> , 12 (2), 163 – 178.	elitian yang dilakukan oleh Dewi Gartika berfokus pada pembangunan kapasitas optimal melalui 8 aspek strategis yang dikemukakan oleh Lusthaus (2002)	research dalam penelitian ini terletak pada teori yang digunakan yaitu teori yang dikemukakan oleh Kotten.
4	ellegriani, M & Vivanet, G. (2021). Evidence-Based Polices in Education : Initiatives and Challenges	ikel ini meneliti mengenai keadaan Kebijakan Pendidikan Berbasis Bukti di Eropa dan	elitian ini mengidentifikasi Balitbangda Provinsi Lampung sebagai organisasi yang

	in Europe. <i>ECNU Review of Education</i> . Vol. 4(1) 25-45	mengidentifikasi organisasi untuk menghasilkan dan mengidentifikasi Bukti serta bagaimana tantangan dalam pengembangannya.	melaksanakan Kebijakan Berbasis Bukti
5	Jaakko, Jaakko. (2022). Politics of Evidence : Think Tank and the Academies Act. <i>British Educational Research Journal</i> .	Artikel ini menganalisis tentang bagaimana dinamika politik berperan dalam pembuatan kebijakan, dan bagaimana arti penting lembaga Think Tank dan Akademisi dalam penekanan Kebijakan Berbasis Bukti/Riset di Inggris.	Penelitian ini berfokus terhadap arti penting lembaga Think Tank yaitu Balitbangda Provinsi Lampung dalam pembuatan Kebijakan Berbasis Riset.
5	Islam, M.M., (2018). The Role of Think Tanks in Social Policy – Making : The Bangladesh Perspective. <i>Journal of International Business and Management</i>	Artikel ini mengkaji peran lembaga Think Tank dalam berbagai aspek sosial melalui gagasan Kebijakan Berbasis Bukti/Riset di Bangladesh	Penelitian ini mengkaji bagaimana pentingnya peran dan strategi gagasan Kebijakan Berbasis Bukti/Riset lembaga Think Tank yang ada di Provinsi Lampung.

2.2 Organisasi Publik

Organisasi publik memiliki definisi yang sangat beragam. Sulistyani (2009:55) memandang organisasi publik sebagai instansi pemerintah yang memiliki legalitas formal, difasilitasi oleh negara untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat di segala bidang yang sifatnya kompleks. Selain itu, menurut penelaahan peneliti dapat terlihat bahwa Mahmudi memandang organisasi publik sebagai instansi yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan sosial.

Sedikit berbeda dengan definisi organisasi publik di atas, Mahsun (2006:14) menjelaskan bahwa Organisasi publik bukan hanya organisasi sosial, organisasi *non profit* dan organisasi pemerintah. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan

barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum.

Berdasarkan beberapa definisi di atas mengenai organisasi publik, peneliti menyimpulkan bahwa organisasi publik merupakan organisasi yang menyelenggarakan kebutuhan masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah.

Organisasi Publik memiliki karakter yang berbeda dengan organisasi lain. Konsep publik memiliki makna bahwa organisasi publik memiliki area orientasi pada sektor publik. Sulistyani (2009:54) mengartikan istilah publik sebagai pelanggan, yaitu seluruh masyarakat yang dilayani melalui lembaga atau instansi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan publik. Lebih lanjut Sulistyani (2009:55) menjelaskan bahwa Organisasi publik sebagai lembaga-lembaga negara, instansi pemerintah yang memiliki legalitas formal, difasilitasi oleh negara untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat di segala bidang yang sifatnya kompleks. Organisasi publik bergerak di lapangan pelayanan publik yang merupakan kewajiban negara, sehingga tidak berkaitan dengan kewajiban mencari laba (*non profit oriented*).

Hal ini dipertegas oleh penjelasan Mahsun (2006:6) yang mengatakan bahwa organisasi *non profit oriented* merupakan organisasi yang bertujuan untuk menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penjelasan Mahsun (2006) merujuk pada suatu kesimpulan bahwa pemerintah merupakan organisasi sektor publik terbesar yang berkewajiban untuk menyediakan barang dan pelayanan publik untuk dinikmati masyarakat secara adil dan merata sebagai bentuk imbalan tidak langsung atas kewajiban membayar pajak yang telah mereka lakukan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung merupakan organisasi publik yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyelenggaraan di bidang kelitbangan yaitu penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian serta evaluasi kebijakan daerah berdasarkan tugas desentralisasi dan tugas

pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian dan pengembangan memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi, bisnis, juga untuk penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Dalam membantu formulasi sebuah kebijakan, sudah tentu pemerintah memerlukan Lembaga Teknis Daerah untuk melaksanakan peningkatan hasil kelitbangan. Lembaga ini disebut dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (litbang) yang merupakan suatu lembaga yang mempunyai kewenangan dalam melakukan tugasnya dibidang penelitian dan pengembangan keilmuan dan memiliki peran strategis jangka panjang bagi kemajuan daerah (Gartika, 2017)

2.3 Strategi

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, yang mana isu kritis atau faktor keberhasilan dapat dibicarakan, serta keputusan strategik bertujuan untuk membuat dampak yang besar serta jangka panjang kepada perilaku dan keberhasilan.

Strategi merupakan sebuah hal yang telah dipelajari sejak berabad abad yang lalu. Strategi awalnya dikenal sebagai sebuah siasat dalam dunia peperangan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, strategi mulai tidak asing namanya dalam dunia bisnis. Strategi dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang dirancang dengan memperbesar peluang keberhasilan dan meminimalisir kegagalan dalam mencapai tujuan. Dalam dunia bisnis, strategi merupakan suatu proses merencanakan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang juga cara – cara yang akan ditempuh dalam mencapai tujuan tersebut. Strategi adalah suatu hal yang fleksibel, berubah, dan meningkat dari waktu ke waktu sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. (Yatminiwati, 2019)

Pengertian strategi dari Alfred Chandler yaitu strategi merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang suatu perusahaan atau organisasi dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan menurut Kenichi

Ohmae, strategi adalah keunggulan bersaing guna mengubah kekuatan perusahaan atau organisasi sehingga menjadi sebanding atau melebihi kekuatan pesaing dengan cara yang paling efisien. (Yulianti, 2018)

Dalam mewujudkan sebuah strategi yang dapat membantu dalam mencapai sebuah tujuan, sudah tentu diperlukan sebuah perencanaan, penggerakan dan pengendalian dalam setiap prosesnya, Hal ini dapat kita sebut *manage* atau mengurus tata laksana dari strategi. Manajemen strategi dapat juga diartikan sebagai seni dalam memformulasi, mengimplementasi dan mengevaluasi seluruh rencana yang dirancang dalam mencapai tujuan.

Manajemen strategi adalah kegiatan yang mendasar dan menyeluruh dalam menyusun rencana mencapai sebuah tujuan. Maka dari itu, manajemen strategi sangat diperlukan dalam sebuah organisasi karena dapat memberikan arah yang jelas dalam mencapai sebuah tujuan, dapat membantu kepentingan setiap pihak yang terlibat dalam organisasi, dapat membantu mencapai tujuan dengan cara yang efisien dan efektif, juga dapat mengantisipasi setiap perubahan dalam situasi dan kondisi yang ada. Manajemen strategi diwujudkan dalam bentuk perencanaan berskala besar dalam arti mencakup seluruh komponen lingkungan sebuah organisasi yang dituangkan dalam bentuk rencana strategis (Renstra) yang dijabarkan menjadi perencanaan operasional, kemudian dijabarkan pula dalam bentuk program kerja dan proyek tahunan. (Yatminiwati, 2019)

Dalam penelitian kali ini, penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai strategi yang dilakukan oleh Balitbangda Provinsi Lampung. Adapun teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah strategi yang dikemukakan oleh Kotten. Penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Kotten karena dinilai dapat memberikan deskripsi mengenai keberhasilan strategi yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Lampung dalam membangun kebijakan berbasis riset melalui analisis tipe tipe strateginya.

Tipe-tipe strategi yang dikemukakan oleh Kotten (1991:81) dalam Salusu (2006) membagi strategi berdasarkan tipenya sebanyak 4 tipe. Adapun tipe-tipenya adalah:

1. Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*)

Dalam strategi organisasi, sebuah strategi dirumuskan melalui visi dan misi suatu pemerintah daerah atau instansi. Melalui visi dan misi yang dimiliki oleh instansi, maka strategi akan tergambarkan dengan jelas. Visi dan Misi berfungsi sebagai petunjuk arah bagi instansi untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi.

2. Strategi Program (*Program Strategy*)

Strategi program ini lebih memberikan perhatian kepada implikasi-implikasi statejik dari suatu program. Program adalah sebuah aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi yang diimplementasikan dalam kegiatan berkelanjutan dan telah disusun secara sistematis serta melibatkan banyak pihak didalamnya. Strategi ini dipergunakan untuk melihat dampak yang terjadi akibat pelaksanaan program bagi instansi.

3. Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*)

Strategi pendukung sumber daya merupakan suatu strategi yang memanfaatkan segala sumber daya yang ada dalam sebuah pemerintah daerah atau instansi. Adapun aspek yang muncul dari strateg sumber daya adalah:

- a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan peralatan yang digunakan untuk memperlancar setiap kegiatan yang diadakan oleh instansi.

- b. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan aset non – material yang harus tersedia dengan baik agar tujuan organisasi dapat terwujud. Sumber Daya Manusia adalah motor penggerak dari terlaksananya setiap program yang dilaksanakan oleh instansi. Sumber Daya Manusia yang

dimiliki oleh instansi pun harus memenuhi dari segi kualitas dan kuantitas. Kualitas kompetensi yang harus dimiliki oleh Sumber Daya Manusia dalam sebuah instansi adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.

c. Sumber Daya Finansial

Keuangan merupakan hal krusial yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan. Suatu kegiatan atau program yang dimiliki oleh instansi tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak didukung dengan keadaan keuangan yang cukup.

4. Strategi Kelembagaan (*Institutional Strategy*)

Dalam strategi kelembagaan, fokus dalam strategi ini adalah mengembangkan organisasi untuk terus melaksanakan inisiatif strategi. Dalam memaksimalkan strategi kelembagaan, instansi harus dilengkapi dengan struktur organisasi, kewenangan dan standar operasional prosedur untuk memudahkan instansi dalam mengembangkan inisiatif strategi.

Lusthaus, Adrien, Anderson, dan Carden (1999) mengembangkan kerangka evaluasi kapasitas organisasi yang bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja suatu institusi. Kapasitas organisasi menurut mereka merupakan kombinasi antara lingkungan eksternal, motivasi, dan kapasitas internal yang memengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Dalam penelitian ini, teori Lusthaus digunakan untuk melengkapi analisis strategi berdasarkan kerangka Jack Koten, dengan hanya mengambil dua bagian yang paling relevan: lingkungan eksternal dan kapasitas organisasi.

1. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal mencakup faktor-faktor di luar organisasi yang dapat memengaruhi keberhasilan strategi. Menurut Lusthaus dkk., faktor tersebut meliputi:

- a. Politik: kebijakan pemerintah, dukungan legislatif, dan stabilitas politik yang dapat memengaruhi arah program.

- b. Ekonomi: ketersediaan sumber pendanaan, kondisi fiskal daerah, dan situasi ekonomi makro.
- c. Sosial: tingkat partisipasi publik, persepsi masyarakat terhadap program, serta tren demografis.
- d. Stakeholder: hubungan dan koordinasi dengan pihak eksternal seperti instansi lain, akademisi, LSM, dan sektor swasta.

Bagian ini digunakan untuk melengkapi pembahasan strategi organisasi dan strategi program pada Balitbangda, khususnya dalam melihat bagaimana faktor eksternal memengaruhi efektivitas strategi yang dijalankan.

2. Kapasitas Organisasi

Kapasitas organisasi adalah kemampuan internal yang dimiliki lembaga untuk melaksanakan program dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dimensi ini mencakup;

- a. Sumber Daya Manusia (SDM): jumlah, kompetensi, dan distribusi pegawai sesuai kebutuhan strategis.
- b. Finansial: ketersediaan anggaran, alokasi yang efektif, dan kemampuan mengelola sumber dana.
- c. Infrastruktur dan Teknologi: sarana, prasarana, serta sistem teknologi informasi yang mendukung operasional dan inovasi.

Bagian ini digunakan untuk melengkapi pembahasan strategi pendukung sumber daya dan strategi kelembagaan, dengan fokus pada kesiapan internal Balitbangda dalam melaksanakan strategi yang telah dirumuskan.

Penggunaan teori Lusthaus dalam penelitian ini bertujuan memperkaya analisis strategi Balitbangda yang sebelumnya berfokus pada empat tipe strategi menurut Jack Koten. Lingkungan eksternal membantu menilai sejauh mana faktor politik, ekonomi, sosial, dan stakeholder memengaruhi keberhasilan strategi organisasi dan program. Sementara itu, kapasitas organisasi memberikan gambaran mendalam tentang kesiapan SDM, finansial, dan infrastruktur dalam mendukung strategi pendukung sumber daya dan strategi

kelembagaan. Dengan demikian, analisis menjadi lebih komprehensif karena mempertimbangkan baik faktor internal maupun eksternal secara terintegrasi.

2.4 Kebijakan Berbasis Riset

Di banyak negara demokrasi, terdapat gelombang minat baru-baru ini terhadap kebijakan berbasis bukti. Baik dari pihak pejabat pemerintah maupun peneliti sosial. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan. Bagi para pembuat keputusan, ini dipandang sebagai peluang untuk perbaikan terus-menerus dalam pengaturan kebijakan dan kinerja program. Para pembuat keputusan yang demokratis semakin bercita-cita untuk melabuhkan banyak program reformasi sosial mereka pada pengetahuan yang relevan dan dapat digunakan yang disediakan oleh ilmu-ilmu sosial. Gerakan berbasis bukti dalam kebijakan publik modern merupakan versi terbaru dari pencarian pengetahuan yang dapat digunakan dan relevan untuk membantu mengatasi dan menyelesaikan masalah. Tuntutan akan pemerintahan yang efisien dan efektif telah mendorong kebutuhan akan informasi kinerja. Hal ini telah memberikan daya ungkit untuk penelitian sosial terapan, yang berkaitan dengan evaluasi program, efektivitas implementasi, dan model baru untuk mengatasi masalah kompleks dengan menggunakan instrumen dan proses kebijakan baru melalui bukti. (Head, 2008)

Bukti dalam dunia akademis merupakan suatu simbol keahlian dan keadilan ketidakberpihakan yang dipersyaratkan untuk menghasilkan komoditas yang berharga (*precious*). Bukti juga menjadi sebuah barang dagangan, dengan mata pencaharian/kehidupan bagi lembaga-lembaga riset yang bergantung pada kapasitas mereka untuk menghasilkan informasi guna memenuhi pelanggan yang ingin tahu (Pawson, 2006). Bukti (*evidence*) dapat juga diartikan sebagai pendekatan modern rasional yang dapat memecahkan masalah dengan fokus pada diagnosis dan pengetahuan yang akurat dari hubungan sebab akibat. Bukti juga merupakan aspirasi untuk menghasilkan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menyesuaikan secara baik suatu program dan merancang panduan/ arahan dan *tool-kit* untuk mengatasi masalah yang diketahui (Asmara & Handoyo, 2015). Dengan demikian bukti merupakan suatu informasi yang memiliki

tingkat akurasi yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya di dalam pemanfaatannya.

Para pemimpin sektor publik telah mengadvokasi peningkatan penggunaan bukti dalam pembuatan kebijakan publik selama bertahun-tahun. Prinsip utamanya adalah bahwa kebijakan harus didasarkan pada bukti yang paling akurat yang menunjukkan apakah suatu kebijakan tertentu akan mencapai tujuannya atau tidak, hasil spesifik apa yang akan dihasilkan oleh kebijakan tersebut dan berapa biaya implementasinya. Pendukung kebijakan berbasis bukti percaya bahwa terlepas dari kendala saat ini, sejauh mana kebijakan berdasarkan bukti dapat ditingkatkan. (Jhosua Newman, 2016)

Banyak kebijakan publik dalam beberapa dekade terakhir didorong oleh gagasan kebijakan berbasis bukti, kebijakan yang berakar pada prinsip-prinsip ilmu sosial dan, lebih khusus lagi, validasi empiris berdasarkan ilmu sosial dan perilaku. Bidang administrasi publik, misalnya, harus mengikuti teori formal, model, metode, dan data ilmu sosial dan perilaku untuk mempelajari proses pemerintahan dalam rangka untuk mengembangkan tubuh pengetahuan empiris tentang apa yang berhasil dan mengapa (Pabst, 2021). Namun meskipun kemunculan istilah kebijakan berbasis bukti sedang digemborkan, pada kenyataannya penerapannya menghadapi hambatan seperti budaya pendukung yang kurang berkembang, akses terbatas ke bukti, dan bukti yang tidak sepenuhnya relevan (David Mills, 2022). Tambahan pula, program-program kebijakan yang telah ditemukan berjalan dengan efektif dengan berdasarkan hasil evaluasi yang ketat, dapat disebut sebagai kebijakan berbasis bukti (Cooney dkk., 2007). Perkembangan kebijakan terjadi pada berbagai tahap dan meluas dari waktu ke waktu untuk merespon dan mengatasi masalah yang ada. Kebijakan selalu perlu diperbarui dan tujuannya untuk diimplementasikan. Meskipun kebijakan yang ada sudah baik, namun kebijakan selalui perlu untuk dikritisi dan dievaluasi demi keberhasilan kebijakan itu sendiri.

Dalam hal ini, riset (bukti) selalu diperlukan oleh para pembuat kebijakan yang mana dijelaskan sebagai berikut:

1. Membantu para peneliti untuk mencari permasalahan dan penyebab pokok dari permasalahan yang ada
2. Membantu para peneliti untuk mendesain alternatif kebijakan yang memungkinkan untuk diambil
3. Membantu para peneliti untuk mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari kebijakan
4. Membantu peneliti untuk mengukur biaya, kinerja dan implementasi dari kebijakan
5. Mendesain opsi kebijakan dan akses yang mungkin bagi pemberian alternatif lain

Adapun beberapa cara untuk meningkatkan penggunaan penelitian dalam pembuatan kebijakan dapat dijelaskan seperti berikut ini (Martha Pellegrini, 2021):

1. Mengaktifkan hubungan antara bukti penelitian dan kebijakan
2. Meningkatkan kualitas, relevansi, dan ketersediaan penelitian untuk menginformasikan kebijakan dengan melibatkan perspektif pembuat kebijakan dalam mendorong agenda penelitian dan memperluas penggunaan sistem ulasan penelitian
3. Mendorong peningkatan kapasitas pengetahuan, kesadaran dan keterampilan di semua bagian sistem untuk penggunaan penelitian.
4. Mengambil keputusan kebijakan untuk mengembangkan kebijakan berbasis bukti di tingkat nasional, regional dan lokal dengan meningkatkan komitmen politik dan keuangan terhadap kebijakan berbasis bukti.
5. Meningkatkan kapasitas penelitian dalam hal pembangkitan dan penggunaan penelitian, dan juga melaksanakan studi evaluasi terhadap kebijakan yang ada sebelumnya.

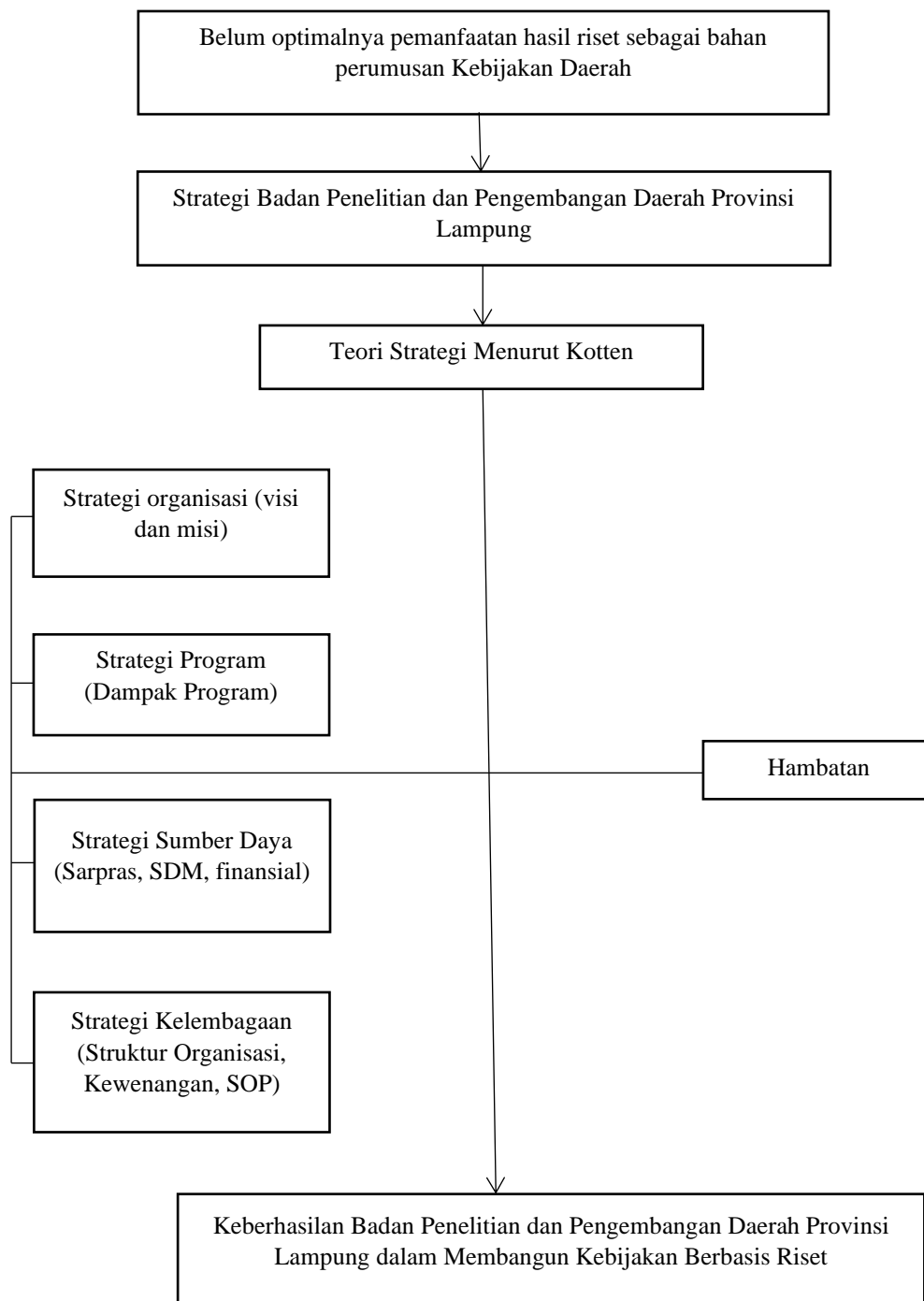
Mengacu pada definisi diatas, kebijakan berbasis bukti diartikan sebagai suatu kebijakan yang didasarkan pada bukti (informasi aktual, hasil riset, dan temuan-temuan lain yang sangat kredibel, terkini, dan jelas manfaatnya) sebagai

salah satu bagian utama dalam proses pembuatan kebijakan dan menjadi input yang sangat berharga bagi para pembuat kebijakan (Asmara & Handoyo, 2015)

2.5 Kerangka Pemikiran

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas dan fungsinya, masih mengalami beberapa kendala seperti yang tercantum dalam Renstra tahun 2019 – 2024 yaitu pemanfaatan hasil kelitbangan yang belum optimal sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah.

Berangkat dari hal tersebut, peneliti mencoba untuk menggunakan model strategi yang diungkapkan oleh Jack Kotten dalam menganalisa Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung. Strategi yang diungkapkan oleh Jack Kotten dibagi menjadi empat aspek yaitu strategi program, strategi sumber daya manusia, strategi sumber daya pendukung dan strategi kelembagaan. Adapun Kerangka berpikir untuk memudahkan mengetahui jalan penelitian sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berusaha untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan sifatnya aktual pada saat dilakukannya penelitian dengan cara mengklasifikasikan data, menganalisis data, dan kemudian menyimpulkan, sehingga diperoleh jawaban terhadap masalah yang dihadapi. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengukur yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu dimana peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena yang diselidiki tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada *generalisasi*. (Sugiyono, 2019)

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batas dalam pengumpulan data, sehingga peneliti fokus memahami masalah dalam penelitiannya. Fokus dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori strategi milik Korten yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi sumber daya dan strategi kelembagaan. Peneliti mencoba memfokuskan penelitian ini pada beberapa hal, antara lain:

1. Menganalisis strategi Balitbangda Provinsi Lampung dalam membangun Kebijakan Berbasis Riset melalui :
 - a. Strategi organisasi yang dapat diketahui melalui visi dan misi

- b. Strategi Program untuk mengetahui dampak dari program yang dijalankan oleh Balitbangda Provinsi Lampung
 - c. Strategi sumber daya (sarana dan prasarana, SDM, keuangan)
 - d. Strategi kelembagaan (struktur organisasi, kewenangan, SOP)
2. Menganalisis hambatan yang dialami oleh Balitbangda Provinsi Lampung dalam Membangun Kebijakan Berbasis Riset.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mendapat sebuah gambaran dan juga informasi yang lebih jelas, lengkap, dan memungkinkan serta mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Lokasi penelitian yang akan penulis laksanakan terletak di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan Balitbangda merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dalam hal riset/penelitian serta pengembangan daerah yang nantinya dapat dijadikan sebuah rekomendasi akan suatu kebijakan. Hingga kemudian terwujudlah kebijakan yang berbasis riset, dengan peran lembaga penelitian yang semakin relevan dengan kebutuhan pemerintahan dan pembangunan. Penguatan peran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) menjadi prioritas, dalam rangka peningkatan kualitas dan pemanfaatan hasil-hasil riset di daerah.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif berupa kata – kata dan tindakan juga dapat berupa data tambahan yang dimuat dalam dokumen atau hal lainnya. Sumber data merupakan tempat dimana data diperoleh dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, terdapat informan yang nantinya akan memberikan informasi dari menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti baik secara lisan maupun tulisan. Data juga didapat dari hasil obsevasi, yaitu kegiatan mengamati benda, gerak atau proses sesuatu (Sugiyono, 2019). Data juga bersumber dari hasil dokumentasi berupa gambar, dokumen maupun hal lainnya. Adapun sumber data dibagi menjadi:

3.4.1 Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan/narasumber. Peneliti akan memberikan pertanyaan seputar kinerja Balitbangda Provinsi Lampung dalam upayanya membangun kebijakan berbasis riset

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang dapat digunakan oleh peneliti sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer (Sugiyono, 2019). Adapun data yang dapat peneliti ambil adalah profil Balitbangda Provinsi Lampung, apa saja kegiatan yang dilaksanakan oleh Balitbangda Provinsi Lampung, dan hal – hal lainnya yang berkaitan dengan upaya Balitbangda Provinsi Lampung lakukan dalam membangun kebijakan berbasis riset.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Wawancara

Wawancara adalah kegiatan percakapan yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber. Narasumber memberikan informasi sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Dalam proses wawancara, peneliti harus menciptakan suasana yang baik agar narasumber mudah diajak untuk bekerja sama. (Sugiyono, 2019)

Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah secara terstruktur dan telah disusun terlebih dahulu sebelum ditanyakan kepada informan. Pertanyaan yang disusun terlebih dahulu bertujuan agar proses wawancara menjadi fokus dan tidak melebar kepada hal yang kurang dibutuhkan. Selain itu, wawancara yang sudah disusun tersebut dijadikan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan kegiatan wawancara. Dalam hal ini, peneliti akan menyusun berbagai pertanyaan untuk dapat mengetahui bagaimana strategi Balitbangda Provinsi Lampung dalam membangun kebijakan berbasis riset.

Adapun narasumber dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 3. 1 Daftar Informan

No	Nama Informan	Keterangan
1.	Ir Hamartoni Ahadis M. Si	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Lampung
2.	Akhmad Baiquni Muhaemin, S.Si.	Plt. Kepala Sub Bidang Teknologi Terapan
3.	Nazdan S.Pi., MP	Kepala Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya
4.	Fitra Utama, S.IP., M.Sc	Katimja Inovasi Pelayanan Publik dan Sarana Prasarana
5.	Adi Asmariadi Budi, S.T., M.S.M	Fungsional Peneliti
6.	Dr. Indah Listiana, S.P., M.Si	Dosen di Fakultas Pertanian Universitas Lampung
7.	Dr. Ir. Citra Persada, M.Sc.	Dosen di Fakultas Teknik Universitas Lampung

3.5.2 Dokumentasi

Pada penelitian ini dokumentasi berupa pengumpulan data dari berbagai catatan peristiwa yang sudah berlalu di Balitbangda Provinsi Lampung. Dokumentasi berupa pengumpulan informasi yang didapatkan melalui dokumen berbentuk arsip maupun gambar yang berkaitan dengan kegiatan birokrasi di Balitbangda Provinsi Lampung.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam metode analisis data peneliti menggunakan model Miles dan Huberman, dengan menggunakan analisis model ini peneliti dapat melakukan analisis saat penelitian sedang berlangsung. metode Miles dan Huberman adalah analisis data dalam kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data menjadi jenuh (Sugiyono, 2019). Aktivitas dalam analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

3.6.1 Kondensasi Data

Kondensasi Data menurut Miles dan Huberman (2014) yaitu merupakan aktivitas yang merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatab lapangan aupun transkrip dalam penelitian.

3.6.2 Penyajian Data

Selanjutnya adalah menyajikan data, bisa berupa tabel, grafik dan lainnya. Hal ini untuk mempermudah peneliti dalam menyusun dan mengorganisasikan hasil penelitian agar mudah dipahami. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan dengan beragamnya data yang telah diperoleh, maka perlu untuk diklasifikasikan apa saja macam-macam data yang telah diperoleh. Hal ini membantu peneliti dalam menyajikan data dari hasil penelitian. Sehingga dalam menyampaikan informasi kepada pembaca tidak didapati data yang rancu atau yang bertentangan dengan realita yang ada. (Sugiyono, 2019)

3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan awal yang masih bersifat sementara akan mengalami perubahan jika tidak ditemui bukti-bukti yang akan mendukung pada tahap pengumpulan berita selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan akan merupakan kesimpulan yang kredibel. Ketika semua data yang dianggap perlu telah peneliti dapatkan, maka selanjutnya diperlukan verifikasi untuk menghindari adanya kesalahpahaman antara peneliti dan objek peneliti

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan. Terdapat empat kriteria keabsahan data yaitu:

3.7.1 Teknik Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Pada penelitian ini data yang berasal dari beberapa kasumber dijadikan sebagai uji kepercayaan tidak bisa disamaratakan seperti pada penelitian kuantitatif, namun dideskriptifkan mana yang spesifik dari sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya diminta kesepakatan dengan sumber data data tersebut. Peneliti melakukan triangulasi dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa orang dengan topik yang sama (Sugiyono, 2019)

3.7.2 Kecukupan Refrensial

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Peneliti mengambil referensi dari dokumen kegiatan dan kinerja di Balitbangda Provinsi Lampung.

3.7.3 Teknik Pemeriksaan Bergantungan

Kebergantungan merupakan substitusi reliabilitas dalam penelitian non-kualitatif. Reliabilitas merupakan syarat bagi validitas. Dalam penelitian kualitatif, uji ketergantungan dilakukan dengan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian kelengkapan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti ini perlu diuji *Dependability* nya dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti mendiskusikannya dengan pembimbing dan Penguji.

3.7.4 Kepastian Data

Menguji kepastian data (*Confirmability*) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. Hal yang akan dilakukan peneliti untuk menguji kepastian ini adalah dengan seminar tertutup atau terbuka dengan mengundang teman sejawat dosen pembimbing serta dosen pembahas.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung dalam membangun kebijakan berbasis riset dengan menggunakan kerangka teori Jack Koten. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan pemanfaatan data dari dokumen perencanaan serta hasil wawancara dengan aktor internal dan eksternal, penelitian ini menemukan bahwa strategi yang dijalankan Balitbangda mencakup empat dimensi utama, yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, dan strategi kelembagaan. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dalam membangun kebijakan berbasis riset:
 - a. Strategi Organisasi

Balitbangda menegaskan arah pembangunan riset melalui *Renstra 2019–2024* yang menempatkan penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan daerah. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa meskipun dokumen perencanaan sudah komprehensif, implementasinya masih bersifat administratif. Peran strategis Balitbangda dalam proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya optimal karena riset sering dijadikan pelengkap, bukan pijakan utama.
 - b. Strategi Program

Program riset difokuskan pada sektor unggulan daerah seperti pertanian, kesehatan, dan pendidikan. Berdasarkan wawancara, sebagian besar penelitian bersifat aplikatif jangka pendek yang cepat menjawab kebutuhan teknis pemerintah. Namun, kontribusi terhadap kebijakan makro dan perencanaan jangka panjang masih terbatas, sehingga potensi riset sebagai *evidence-based policy* belum terwujud sepenuhnya.
 - c. Strategi Pendukung Sumber Daya

Dari sisi SDM, jumlah peneliti fungsional masih minim dibandingkan beban kerja, meski kualitas sebagian pegawai mulai ditingkatkan melalui pelatihan, studi lanjut, dan kolaborasi akademik. Dari sisi finansial, ketergantungan pada APBD dengan anggaran terbatas membatasi ruang inovasi riset. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa keterbatasan sumber daya ini membuat Balitbangda harus selektif dalam menentukan prioritas penelitian

d. Strategi Kelembagaan

Balitbangda memperkuat posisinya melalui jejaring kerja sama dengan universitas, lembaga riset nasional, dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Kolaborasi ini berhasil meningkatkan legitimasi riset sekaligus memperluas sumber pengetahuan. Namun, wawancara menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor sering tidak berjalan mulus, sehingga hasil riset belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan daerah.

2. Selain strategi yang telah dijalankan, penelitian ini juga menemukan berbagai hambatan yang dihadapi Balitbangda Provinsi Lampung dalam melaksanakan upaya membangun kebijakan berbasis riset, yaitu:

a. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)

Jumlah peneliti fungsional sangat terbatas, sementara sebagian besar pegawai masih berstatus staf administratif. Hal ini menyebabkan kapasitas produksi penelitian rendah, dan kualitas analisis kebijakan berbasis riset belum konsisten.

b. Minimnya alokasi anggaran riset

Anggaran penelitian di Balitbangda sebagian besar bersumber dari APBD yang jumlahnya terbatas. Akibatnya, kegiatan riset sering dikurangi skala maupun jangkauannya, sehingga sulit menghasilkan penelitian yang mendalam dan berkelanjutan.

c. Lemahnya sinergi lintas sektor

Hasil wawancara menunjukkan bahwa koordinasi antara Balitbangda dengan OPD lain belum berjalan optimal. Banyak hasil penelitian tidak diadopsi ke dalam kebijakan karena perbedaan prioritas, rendahnya komunikasi, dan kurangnya mekanisme integrasi riset ke proses perencanaan.

- d. Budaya Kebijakan yang belum sepenuhnya berbasis riset.

Temuan di lapangan mengindikasikan bahwa riset sering diposisikan hanya sebagai formalitas atau pelengkap kebijakan yang sudah diputuskan. Hal ini melemahkan peran strategis Balitbangda dalam memastikan setiap kebijakan daerah didasarkan pada bukti ilmiah.

Dengan demikian, temuan konseptual dari penelitian ini adalah bahwa strategi organisasi publik dalam membangun kebijakan berbasis riset harus dipahami sebagai kesatuan pola yang terintegrasi, bukan sebagai strategi yang terpisah. Kontribusi penelitian ini terletak pada perluasan pemahaman terhadap model Jack Koten, bahwa penerapannya pada konteks birokrasi daerah membutuhkan pembacaan lebih kritis terhadap keterhubungan antar-strategi dan pengaruh lingkungan eksternal.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian mengenai hambatan yang dihadapi Balitbangda Provinsi Lampung dalam membangun kebijakan berbasis riset, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat kapasitas kelembagaan riset di Balitbangda.

Upaya penguatan ini mencakup peningkatan kualitas dan kuantitas SDM peneliti melalui rekrutmen jabatan fungsional, pengembangan kompetensi melalui pendidikan lanjutan, pelatihan metodologi riset, serta kolaborasi dengan akademisi dan lembaga penelitian. Selain itu, pendanaan riset perlu dioptimalkan tidak hanya melalui peningkatan alokasi APBD, tetapi juga dengan diversifikasi sumber pendanaan seperti kerja sama riset dengan universitas, lembaga donor, dan sektor swasta. Secara analitis, penguatan

aspek SDM dan pembiayaan ini merupakan fondasi bagi kinerja lembaga litbang, karena tanpa kapasitas internal yang memadai, fungsi Balitbangda sebagai penghasil evidence untuk mendukung kebijakan tidak dapat berjalan secara optimal.

2. Meningkatkan integrasi hasil riset dalam proses perumusan kebijakan daerah. Integrasi ini memerlukan mekanisme koordinasi lintas sektor yang lebih sistematis antara Balitbangda dan OPD, sehingga kebutuhan kebijakan dapat ditautkan dengan agenda penelitian secara berkelanjutan. Forum rutin seperti policy dialogue dapat menjadi sarana penyelarasan tersebut. Selain itu, penguatan budaya kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy making) harus didorong melalui regulasi internal yang mewajibkan penggunaan hasil riset sebagai dasar pengambilan keputusan, serta melalui skema insentif bagi OPD yang konsisten menerapkan pendekatan tersebut. Secara akademis, langkah ini penting untuk mengatasi kesenjangan antara produksi pengetahuan dan implementasi kebijakan, sekaligus memastikan bahwa riset tidak berhenti pada output, tetapi benar-benar menjadi instrumen strategis dalam pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTKA

- Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments. Georgetown University Press.
- Asmara, A. Y., & Handoyo, S. (2015). Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti: Studi Pada Proses Pembuatan Kebijakan Standarisasi Alat dan Mesin Pertanian di Indonesia. *STI Policy and Management Journal*, 13(1): 43-64. <http://dx.doi.org/10.14203/STIPM.2015.38>.
- Bappenas. (2020). Laporan Evaluasi Kelembagaan Litbang Daerah dan Rekomendasi Reformasi Fungsi Penelitian Daerah. Jakarta: Direktorat Litbang Bappenas.
- Coccia, M. (2018). An Introduction to the Theory of the Lab: How a Government Research Organization Works. arXiv Preprint.
- Darmawan, A. (2021). Peran Kelembagaan Riset Daerah dalam Mendorong Kebijakan Berbasis Bukti. *Jurnal Litbang Kemendagri*, 17(1), 55-56.
- David Mills, S. P. (2022). Evidence - Based Public Policy Decision - Making in Smart Cities: Does Extant Theory Support Achievement of City. Sustainability. <https://doi.org/10.51577/jgpi.v1i2.159>
- Duadji, N. (2013). Manajemen Pelayanan Publik. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Dunn, W. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Dunn, W. (2018). Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed.). New York: Routledge.
- Farida Nugrahani, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. Solo: Solo: Cakra Books.
- Gartika, D. (2017). Strategi Penguatan Kapasitas Tata Kelola Penelitian dan Pengembangan Di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 163 - 178. <https://jkpjjournal.com>
- Handayani, S. (2019). Model Organisasi Riset Kolaboratif dalam Penguatan Kebijakan Berbasis Bukti. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 6(2), 150-163.

- Harahap, Y. &. (2021). Policy Advocay dan Transformasi Hasil Litbangda Menjadi Peraturan Daerah . Jurnal Administrasi Publik .
- Hardjati, S. (2021). Buku Ajar Manajemen Strategi Sektor Publik. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Haris. (2022). Evaluasi Peran Lembaga Litbang Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Berbasis Bukti. Jurnal Administrasi Publik Daerah, 4(1), 45–59.
- Head, B. W. (2008). Research and Evaluation: Three Lenses of Evidence-Based Policy. The Australian Journal of Public Administration. 67(1), 1–11. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.2007.00564.x>
- Hidayat, R. &. (2020). Strategi Adaptif Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana melalui Kolaborasi Eksternal. Jurnal Administrasi Publik, 17(1), 89-98.
- Islam, M. (2018). The Role of Think Tanks in Social Policy - Making: The Bangladesh Perspective. Journal of International Business and Management.
- Joshua N., & Cherney, A. (2017). Policy capacity and evidence-based policy in the public service, Public Management Review, 19:2, 157-174,
- Kauko, J. (2022). Politics of evidence: Think Tank and the academies act British Educational Research Journal.
- Kenna, R. &. (2010). Critical Mass and the Structure of Research Groups in Europe. Scientometrics, 86(2), 527-540.
- Koten, J. (2007). Strategic Alignment: Managing Strategy through Culture. The Conference Board.
- Koten, J. (2009). Values-Centered Leadership: Integrating Ethics into Core Business Strategies. Chicago: DePaul University Institute for Business and Professional Ethics.
- Kurnaeni, G. (2014). Peningkatan Kapasitas Fungsi Penelitian dan Pengembangan Daerah (Studi Kasus pada Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan). Jurnal Administrasi Negara, 20 (1), 11 - 19.
- Kurniawan, H. &. (2022). Riset Tematik dan Efektivitas Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah . Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, 12(1), 45 - 56.

- Kusumastuti, A. &. (2020). Pengaruh Standar Operasional Prosedur Terhadap Efektivitas Penelitian Kebijakan Publik di Pemerintah Daerah. . Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 24(2), 89–101.
- Lestari. (2022). Transformasi Riset ke Kebijakan Publik : Tantangan dan Solusi. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik , 9(2), 77 - 89.
- Lubis. (2021). Analisis Implementasi Strategi Organisasi Litbang di Pemerintah Daerah. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 18 No. 2, hal. 115–130.
- Luthfi, M. &. (2022). Keseimbangan Fiskal dan Tantangan Pendanaan Riset Daerah. Jurnal ASET, 14(1), 55-68.
- Maulana, A. (2016). Manajemen Strategik. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.
- Meutia, I. F. (2017). Analisis Kebijakan Publik. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Meutia, I. F., & Liu, T. A. (2019). Polisi Dan Sumber Daya Manusia: Studi Assesment Centre Berbasis Merit System Di Polda Lampung. Jurnal Administrativa" Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik", 1(1), 7-18.
- Meutia, I. F., Sujadmiko, B., Yulianti, D., Putra, K. A., & Aini, S. N. (2021, December). The Agenda Setting Policy for Hajj and Umrah in Post Pandemic. In 2nd International Indonesia Conference on Interdisciplinary Studies (IICIS 2021) (pp. 32-37). Atlantis Press.
- Mongeon, P. B. (2016). Concentration of Research Funding Leads to Diminishing Marginal Returns. Research Evaluation, 25(4), 396–404.
- Mulyadi. (2018). Pengaruh Ketersediaan Sarana Kerja terhadap Produktivitas Pegawai di Lembaga Pemerintah Daerah. Jurnal Manajemen dan Organisasi , 15(2). 101-102.
- Mulyana. (2020). Kewenangan Litbang Daerah dalam Mendorong Kebijakan Inovatif. urnal Ilmu Administrasi Negara, 7(2), 115–130.
- Nugroho, D. S. (2022). Institutional Misalignment in Local Research Collaboration : The Case of Regional Innovation Forums. Journal of Regional Innovaion and Policy Studies, 6(1), 45-59.

- Nurmandi, A. &. (2015). Institutional Design of Research-Based Policy Making at Local Government in Indonesia. *Public Policy and Administration Research*, 5(2), 25–34.
- Nutley, S. W. (2007). *Using Evidence: How Research Can Inform Public Services*. Bristol: Policy Press.
- Pabst, A. (2021). Rethinking Evidence-Based Policy. *National Institute Economic Review*. <https://doi.org/10.1017/nie.2021.2>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- Prasojo, L. D. (2018). *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: UNY Press.
- Purwanto, A. (2019). Penguatan Kapasitas SDM Peneliti Daerah dalam Sistem Inovasi Daerah . *Jurnal Reformasi Administrasi*.
- Ramatullah, A. (2020). Strategi Perencanaan Kelitbangan dalam Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah. *Jurnal BPP Kemendagri*.
- Ritonga, I. T. (2019). Efisiensi Keuangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya terhadap Layanan Publik dan Inovasi Kebijakan. *Journal of Accounting and Investment*, 20(3), 243–257.
- Rohman, H. &. (2020). Sinergi Penyusunan Agenda Riset Berbasis Kebutuhan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* , 11(2), 134-149.
- Rukun Santoso, L. S. (2022). *Konsep dan Implementasi Manajemen Strategi*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Salusu. (2006). *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Grasindo.
- Sartika. R., &. H. (2019). Efektivitas Diseminasi Hasil Riset dalam Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(03), 203 -215.
- Sedarmayanti. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Seftiyono, C. (2020). Transformasi Noice menjadi Voice: Politik keterbukaan dalam kekinian diskursus Evidence Based Policy di Indonesia.

- Setiawan, I. &. (2021). Policy Coherence dalam Sinkronisasi Program Riset Pusat dan Daerah. *Jurnal Perencanaan Pembangunan* , 25(2), 89-102.
- Setyaningsih, D. N. (2022). Integrated Research Structures and Local Policy Relevance: A Study of Indonesian Local Government Think Tanks. *Journal of Local Government Studies*, 18(3), 201–217.
- Simangunsong, F. (2018). Kewenangan Lembaga Riset Daerah dalam Mendukung Kebijakan Berbasis Data Empiris. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 77–88.
- Sugiyono, D. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Akfabeta.
- Sulistiyono, R. A. (2021). Sinergi Interbidang dalam Kelembagaan Litbang Daerah: Studi Kasus pada Lembaga Penelitian Provinsi. *Jurnal Bina Praja*, 13(1), 33-45.
- Sumarto, T. &. (2020). Struktur Organisasi dan Efektivitas Penelitian Kebijakan di Lembaga Litbang Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 115 - 128.
- Supanto, F. (2018). *Manajemen Strategi Organisasi Publik dan Privat*. Malang: Empatdua Media.
- Suwarsono. (2015). *Manajemen Strategik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Syamsuddin, R., & Fuady, M. I. N. (2020). Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 63-79.
- Timur, B. K. (2021). Profil Litbang Daerah: Tantangan dan Strategi Penguatan Kapasitas Penelitian Daerah. Kalimantan Timur: Bappeda Provinsi .
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Wahyuni, D. &. (2020). Inovasi Daerah Berbasis Potensi Lokal : Studi Empiris di Lampung dan Jawa Tengah. *Jurnal Inovasi Daerah* .
- Wiryawan, A. S. (2019). Penerapan SOP dalam Meningkatkan Kualitas Layanan dan Kinerja Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 10(1), 45–58.

- Wismono, F. H., Wahyudi, A., Hidayah, K., Sartika, D., Fadhly, M., Rahmawati, I., & Noor, A. (2019). Strategi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Sida) Di Kota Samarinda. *Jurnal Riset Inossa*, 1(1), 60-75
- Yatminiwati, M. (2019). *Manajemen Strategi: Buku Ajar Perkuliahan Bagi Mahasiswa*. Jawa Timur: Widya Gama Press.
- Yulianti, D. (2018). *Buku Ajar Manajemen Strategi Sektor Publik*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Yuwono. (2022). Strategi Sinergi Lembaga Penelitian Daerah dengan OPD Teknis: Studi Kasus di Jawa Tengah. *ournal of Regional Governance*, Vol. 5 No. 1, hal. 47–61.

